

## BAB V

### KESIMPULAN

Feminisme tidak pernah serta-merta filsafat. Feminisme adalah sebuah gerakan politik yang ingin mengusahakan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun posisi feminisme dalam mengkonseptualisasikan subjeknya sangat terpengaruh oleh konsep modern. Adopsi konsep yang fondasional telah membawa feminisme pada posisi yang hegemonik dimana feminisme justru menjadi ruang eksklusif bagi sesama perempuan. Klaim feminisme sebagai gerakan perempuan universal tidak memandang perbedaan dan partikularitas di antara perempuan. Feminisme ingin berdiri di atas jejak yang fondasional dan tidak ingin diganggu oleh kontingenitas perbedaan.

Beberapa konseptualisasi modern feminisme menjadi hegemonik ketika dipraktekkan ke dalam politik. Feminisme liberal maupun radikal melandaskan diri pada universalisme, asumsi kekuasaan yang meluas dan makro, serta adanya kepercayaan bahwa terdapat kebebasan ketika kekuasaan dihancurkan. Tidak saja feminisme mengambil resiko dengan menggunakan politik representasi tetapi juga feminisme telah menjadi politik identitas. Penciptaan subjek yang stabil mengkategorikan perempuan dan menyingkirkan mereka yang pinggiran yang tidak memiliki politik agensi. Akibatnya feminisme mengalami kritik dari pinggirannya, dan ditantang oleh wacana *subaltern*. Feminisme juga mengalami pergeseran paradigma dari persamaan menuju perbedaan, dan juga dari suatu analisis struktural ke analisis diskursus.

Konsepsi persamaan yang diusung oleh feminis liberal telah digeser dengan asumsi perbedaan oleh feminis radikal. Namun perbedaan yang dianut menyangkut perbedaan gender dan relasinya yang singular padahal feminisme juga harus meluaskan perbedaan berdasarkan ras, kelas, etnis dan kondisi kolonialisme. Feminisme melakukan dominasi representasi terhadap perempuan lain yang dianggap marginal seperti perempuan kulit hitam dan dunia ketiga.

Feminisme tidak dapat mengasumsikan adanya kekuasaan yang singular seperti patriarki karena realitas sebenarnya perempuan hidup di dalam sirkulasi kuasa yang timpang. Feminisme tidak dapat diasumsikan secara normatif sebagai dikursus yang lepas dari sejarah karena pada dasarnya subjek perempuan dunia ketiga sangat dipengaruhi oleh kesejarahannya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa terdapat relasi kuasa yang telah dibentuk oleh imperialisme yang sesungguhnya mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi negara bekas-jajahan. Karena itu politik representasi feminisme yang berbicara atas nama perempuan tidak kontekstual dan relevan ketika dibawa ke wilayah dunia ketiga.

Dunia dibangun berdasar relasi kuasa yang memberi privilese bagi Barat untuk mendominasi yang non-barat, dunia pertama terhadap dunia ketiga. Barat dianggap tidak saja menguasai ekonomi tetapi juga pengetahuan sehingga terdapat paradigma yang dipaksakan ke dalam subjek dunia ketiga. Hal ini menjadi sebuah *epistemic violence* yang membisukan kaum tertindas. Pada akhirnya kaum tertindas atau *The Other* sekalipun berusaha direpresentasi oleh para elit sebagai juru bicara Barat. Begitu juga perempuan direpresentasi secara dominan, menganggap perempuan dunia ketiga sebagai kelompok homogen, dijustifikasi posisinya sebagai *The Other* oleh Barat. Identitas perempuan menjadi tercerabut, direpresentasi secara transparan, dan dibisukan. Perempuan menjadi subaltern, tidak saja dikonstruksi oleh sistem imperialisme tetapi juga konsep feminisme hegemonik. Karena itu perempuan dua kali berada pada posisi marginal yang tidak dapat berbicara, selalu direpresentasi dan identitasnya tercerabut.

Dari kritik perempuan yang berada di ranah pinggiran sesungguhnya terdapat tanda-tanda adanya keinginan untuk menggoyahkan pusat dan menyudahi problem oposisi biner yang menyangkut barat/non-barat, pusat/pinggir. Feminisme menjadi pencarian ruang perbedaan, yang berada di tengah-tengah oposisi biner. Hal ini dimungkinkan bagi Luce Irigaray yang menciptakan interval perbedaan di dalam sebuah konsep psikoanalisis yang sesungguhnya menyingkirkan subjek perempuan. Di dalam suatu tatanan simbolik dominan, dimana perempuan tersingkir sebagai yang tak terpahami, justru perempuan diajak berpikir di luar tatanan itu. Perempuan diberi akses pada subjektivitasnya,

diusahakan dapat mengafirmasi femininitasnya dan juga menciptakan bahasa feminin. Tidak hanya itu perempuan dilihat di dalam posisi antara *The One* dan *The Other*. Selama ini feminisme didefinisi secara maskulin, oleh ekonomi persamaan, dimana ruang *The Other* selalu dikolonisasi oleh *The One*. Namun, berpikir di luar tatanan dominan tidak cukup karena itu perempuan harus menggoyahkan tatanan dominan agar posisi perempuan sebagai *non-truth of truth* (dimana perempuan tidak memiliki referensi literal) dapat dijelaskan. Tetapi bagaimana jika subjek terkonstruksi oleh regularisasi dan normalisasi kuasa.

Eksklusi di dalam feminisme menyangkut otonomi dan otoritas dimana yang satu berbicara dan yang lain bisu. Politik normatif feminisme menyangkut kontestasi dimana yang satu dapat berbicara dan yang lain tidak. Subjek itu sendiri dibentuk oleh sistem eksklusi dan diferensiasi yang dilakukan oleh otoritas tertentu. Subjek selalu dilekatkan dengan seperangkat prosedur yang saling menyingkirkan dan selektif. Namun, proses konstruksi ini tidak stabil karena itu subjek tidak dapat dilandaskan secara ajeg. Karena itu di atas landasan yang kontingen dapatkah politik normatif feminisme dibangun? Di dalam subjek yang tidak stabil dapatkah epistemologi feminis dipertahankan? Mempertanyakan subjek bukan berarti ingin membuang subjek tetapi menginterogasi proses konstruksinya.

Di dalam kondisi mendesentralisasi subjek, menciptakan landasan yang kontingen dan fokus pada perbedaan, feminisme harus berhubungan dengan konsep posmodernisme. Namun, adopsi konsep posmodernisme semakin lama akan mengeliminasi feminisme sendiri. Perdebatan posmodernisme semakin lama mendeesensialisasi feminisme dan menghilangkan pembicaraan gender. Apakah cukup dengan mengatakan bahwa sepanjang subjek didesentralisasi maka hal itu baik bagi feminisme? Feminisme harus berhati-hati mengadopsi konsep posmodernisme karena akan bersiko menghilangkan feminisme itu sendiri. Namun, dekonstruksi membantu melihat permasalahan lebih jernih, posisinya sebagai struktur grafematik juga masih dapat berpengaruh ke ranah politik.

Feminisme selama ini mencari ruang dimana perempuan dapat dipandang berdasarkan perbedaan. Hanya *differance* yang memungkinkan perempuan untuk

menciptakan ruang perbedaan. Dekonstruksi dikarakterisasi oleh pengulangan yang dikarakterisasi oleh ketidakhadiran, sehingga posisi dua pengikatnya menjaga agar pertanyaan dapat terus muncul. Jika feminisme tidak ingin melandaskan dirinya pada posisi hegemonik maka feminisme harus terus-menerus membuka ruang pertanyaan baru yang dapat mencegah adanya fondasionalisme. Karena itu feminisme hanya menjadi sebuah arah baru yang dapat lebih dipahami berdasarkan perbedaan, dapat meluaskan sudut pandang, dapat melihat kompleksitas, dan dapat dipertanyakan kembali. Bagi penulis, pencapaian arah baru akan melandaskan feminisme pada posisi fondasional dan hegemonik.

## **5.2. SARAN**

Feminisme harus berani melihat permasalahan secara konseptual. Jika perempuan banyak diteliti dengan menggunakan teori yang tidak relevan bagi generasi mendatang, maka feminisme tidak akan banyak membantu kemajuan perempuan. Jika feminisme berpolitik dan bergelut dengan praksis tetapi masih mengadopsi kerangka konseptual feminisme yang hegemonik, maka feminisme akan mengalami jalan buntu. Karena itu, penulis menyarankan agar perjuangan feminisme tidak saja direalisasikan di dalam politik praksis tetapi juga bergulat dengan konseptualisasi teori feminisme sehingga dapat memperbaiki dan menambah kekurangan yang terjadi di ranah praksis.